

**PANDANGAN AKHIR FRAKSI PARTAI  
DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (PDI  
PERJUANGAN)**

ATAS

**RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
TENTANG:**

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023**



**PDI  
PERJUANGAN**

**DISAMPAIKAN**

**DALAM RAPAT PARIPURNA DPRD  
KABUPATEN KEBUMEN**

**PADA HARI SENIN, TANGGAL 28  
NOVEMBER 2022**

***Assalamu'alaikum Wr. Wb.,***

***Salam sejahtera untuk kita semua,***

***MERDEKA !!!***

Yth. Saudara Pimpinan Rapat Paripurna sekaligus Ketua DPRD,  
para Wakil Ketua DPRD dan para anggota DPRD Kabupaten  
Kebumen;

Ysh. Bupati dan Wakil Bupati Kebumen

Ysh. Pimpinan Forkompinda Kabupaten Kebumen

Ysh. Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen, Para Asisten  
Sekretariat Daerah, Staf Ahli Bupati Kebumen, Kepala Perangkat  
Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen, Ketua dan  
Sekretaris KPU, Camat se-Kabupaten Kebumen, Kepala Bagian di  
lingkungan Setda Kebumen dan Pimpinan BUMD serta Direktur  
RSDS dan RSUD Prembun;

Ysh. Sekretaris DPRD Kabupaten Kebumen dan seluruh jajarannya.

Ysh. Hadirin dan segenap Undangan Rapat Paripurna DPRD  
Kabupaten Kebumen, para wartawan dari berbagai media cetak,  
serta segenap warga masyarakat Kabupaten Kebumen di manapun

berada yang menangkap siaran Rapat Paripurna ini melalui siaran Radio In FM yang berbahagia,

***Hadirin Peserta Rapat Paripurna yang kami hormati;***

Pertama-tama marilah kita bersama memanjatkan puji syukur kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga dapat hadir dan mengikuti Rapat Paripurna dalam rangka penyampaian pandangan akhir fraksi-fraksi atas Rancangan Perda tentang ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Tidak lupa, sholawat dan salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi Besar Muhammad SAW, semoga kita semua termasuk golongan yang mendapatkan syafaatnya nanti di Yaumul Akhir. Amienn....

***Hadirin Peserta Rapat Paripurna yang kami hormati;***

Dalam kesempatan ini, izinkan kami atas nama Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Kebumen mengucapkan terima kasih kepada:

*Pertama*, Pimpinan Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kebumen yang telah memberikan kesempatan kami mewakili Fraksi PDI

Perjuangan untuk menyampaikan pandangan akhir atas Rancangan Perda tentang ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

*Kedua*, Bupati Kebumen yang telah menyampaikan Rancangan Perda ini.

*Ketiga*, Badan Anggaran DPRD Kabupaten Kebumen yang telah membahas Raperda tersebut dan telah menyampaikan laporannya beberapa waktu yang lalu.

*Keempat*, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang bersama Badan Anggaran DPRD Kabupaten Kebumen telah melakukan pembahasan secara intensif Raperda ini.

*kelima*, Sekretaris DPRD Kabupaten Kebumen dan seluruh jajarannya yang telah membantu memfasilitasi Rapat Paripurna ini.

***Hadirin Peserta Rapat Paripurna yang kami hormati;***

Selanjutnya, terkait Rancangan Perda ini, Fraksi PDI Perjuangan menyampaikan pendapat akhir sebagai berikut:

1. Fraksi PDI Perjuangan sepakat dengan Badan Anggaran bahwa pembahasan RAPBD Tahun Anggaran 2023 harus didasari oleh arah kebijakan dan tema pembangunan yang

telah tertuang di dalam dokumen perencanaan kita baik RPJMD tahun 2021-2026 maupun RKPD tahun 2023, dimana pembangunan kita diarahkan untuk pemantapan kualitas infrastruktur dalam rangka pengembangan perekonomian dan pertanian serta peningkatan profesionalisme aparatur dan kualitas sumber daya manusia.

2. Kami juga sepakat bahwa selain mengacu kepada arah kebijakan dan tema di atas, APBD Tahun 2023 harus disusun dengan tetap memperhatikan kaidah-kaidah penyusunan yang telah ditentukan pemerintah pusat yakni Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 serta aturan-aturan lain yang relevan seperti aturan tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) enam urusan wajib pelayanan dasar, proporsi untuk urusan pendidikan dan kesehatan dan sebagainya.

3. Pada laporan Badan Anggaran disampaikan bahwa pendapatan daerah tahun 2023 nanti diproyeksikan sebesar 2,80 Triliun lebih dengan proporsi terbesar masih pada pendapatan transfer yang sebesar 2,37 Triliun lebih, diikuti

pendapatan asli daerah sebesar 432 miliar lebih serta lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar 2,1 miliar lebih. Kami sungguh berharap tahun depan PAD kita dapat jauh melampaui proyeksi tersebut, apalagi tahun ini kita sedang membahas satu raperda yakni raperda tentang digitalisasi transaksi PAD sehingga diharapkan dapat secara signifikan mendongkrak PAD kita.

4. Sedangkan untuk belanja, proporsi besarnya masih pada belanja operasi yang di dalamnya terdapat unsur belanja pegawai dan belanja barang dan jasa yang sebesar 1,9 triliun lebih, kemudian belanja modal sebesar 234 miliar lebih, belanja tidak terduga 2 miliar dan belanja transfer 634 miliar lebih sehingga total belanja kita tahun depan diproyeksikan sebesar 2,83 triliun lebih. Dari gambaran diatas terdapat proyeksi defisit anggaran yang akan ditutup dengan pembiayaan netto sebesar 85,1 miliar lebih, yang diperoleh dari penerimaan pembiayaan daerah diproyeksikan sebesar 131,5 miliar lebih yang didapatkan dari proyeksi SiLPA dan penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah, dikurangi pengeluaran pembiayaan sebesar 46,3 miliar lebih untuk

pembentukan dana cadangan, penyertaan modal daerah dan pemberian pinjaman daerah.

5. Selanjutnya atas beberapa rekomendasi Badan Anggaran, pada prinsipnya kami menyepakati hal tersebut seperti perlunya optimalisasi fungsi perangkat daerah yang menghasilkan PAD melalui peningkatan kualitas SDM dan kelembagaannya agar target-target PAD dapat mendekati potensi yang sesungguhnya serta tidak mengalami kebocoran. Kemudian terkait dengan pemenuhan SPM, pemerintah daerah harus secara serius dan konsisten mempedomani aturan teknis dari masing-masing kementerian yang menangani urusan yang ada SPM-nya, sehingga laporan hasil pemenuhan SPM itu nyata benar adanya dan dapat dipertanggungjawabkan, jika memang kita belum secara maksimal melaksanakan SPM tersebut, harus kita akui secara ksatria.

6. Terkait dengan universal health coverage (UHC), kami juga menyepakati apa yang direkomendasikan oleh Badan Anggaran. UHC adalah PR yang telah ada cukup lama dan memang perlu dicarikan solusi, paling tidak ada progres yang

nyata tahun per tahunnya, karena upaya ini tidak hanya membutuhkan energi yang besar namun juga anggaran yang besar serta melibatkan banyak pemangku kepentingan.

7. Kami juga sepakat bahwa atas beberapa point yang disampaikan Badan Anggaran seperti perbaikan jalan yang rusak, perlunya sosialisasi peraturan daerah, percepatan penanggulangan kemiskinan, antisipasi bencana alam, dan lain sebagainya. Isu-isu tersebut kami kira lahir dari respon DPRD atas aspirasi yang muncul dari masyarakat sehingga harus menjadi prioritas kita bersama.

8. Terkait dengan pergeseran anggaran antar urusan sesuai dengan mandat dari pemerintah pusat, kami berpandangan bahwa kita harus laksanakan dengan sebaik-baiknya. Jika ada pemikiran bahwa ada proporsi anggaran yang terlalu besar untuk urusan kesehatan dan pendidikan, maka refleksi diri perlu kita lakukan, karena kami yakin Kebumen masih memiliki PR besar pada bidang pendidikan dan kesehatan sehingga momentum ini justru harus secara maksimal kita manfaatkan untuk menyelesaikan PR-PR tersebut. Terkait dengan rekomendasi Badan Anggaran bahwa infrastruktur



pelayanan publik harus tetap diprioritaskan termasuk kegiatan-kegiatan yang bersumber dari pokok-pokok pikiran DPRD, maka kami sepenuhnya sepakat dan meminta perangkat daerah terkait untuk dapat melakukan penyesuaian. Kami juga meminta peran aktif dari komisi-komisi DPRD untuk terus mengawasi jalannya pelaksanaan APBD ini ke depan agar yang kita harapkan bersama dapat tercapai.

***Peserta Rapat Paripurna yang kami hormati,***

Demikian penyampaian Pendapat akhir Fraksi PDI Perjuangan terhadap Rancangan Perda tentang ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023 kami cukupkan sampai di sini. Dengan mengucapkan "BISMILLAHIROHMANIRROHIM" dan penuh rasa tanggung jawab , Fraksi PDI Perjuangan dapat "MENERIMA DAN MENYETUJUI" Raperda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 untuk selanjutnya ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, dengan beberapa catatan di atas sebagai dokumen yang tidak terpisahkan dalam risalah sidang Paripurna ini. Selanjutnya, atas tutur kata dan

sikap kami yang kurang berkenan selama penyampaian ini, kami  
mohon maaf yang setulus-tulusnya.

***Billahi Taufik Wal Hidayah,***

***wassalamu'alaikum Warokmatullahi Wabarokatuh***

***MERDEKA !!!***

**FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

**KABUPATEN KEBUMEN**

**KETUA**



**Drs. H. TONGAT**

**SEKRETARIS**



**FITRIA HANDINI, SH**